

GENDER DI MASA KRISIS: TELAAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREMPUAN

Asep Kurniawan*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

email: asepkurniawan@syekhnurjati.ac.id

• **Received:** 29 April 2021 • **Accepted:** 3 Mei 2021 • **Published online:** 1 Juni 2021

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap secara mendalam kepemimpinan perempuan selama pandemi Covid-19 dan dampak pandemi Covid-19 ini terhadapnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hukum normatif yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan kepustakaan. Pendekatan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Data-data diorganisir, dianalisis dengan cara induktif, dan diklasifikasikan ke dalam banyak unit dan diformulasi ke dalam suatu pola. Hasil penelitian menunjukkan kiprah para pemimpin perempuan selama Covid-19 cukup berhasil mengendalikan kondisi dengan kelebihan-kelebihan kepemimpinannya. Meskipun demikian, secara umum pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan pada hampir seluruh penduduk dunia, khususnya bagi kaum perempuan, yakni beban berlipat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan ketimpangan perlakuan dalam bidang ekonomi. Semua dampak tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak gender-neutral disebabkan posisi perempuan yang sudah sejak awal diposisikan tidak seimbangan dengan laki-laki dalam sektor ekonomi dan sosial. Untuk itu, semestinya harus ada upaya emansipasi untuk menginisiasi kebijakan yang sensitif terhadap persoalan gender dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Kepemimpinan, Perempuan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial.*

Abstract:

The purpose of this study was to reveal in depth the leadership of women during the Covid-19 pandemic and the impact of the Covid-19 pandemic on her. This research used a qualitative method with normative law which was carried out by reviewing the literature. The approach used a contextual and statutory approach. The data were organized, analyzed inductively, and classified into many units and formulated into a pattern. The results showed that the progress of female leaders during Covid-19 was quite successful in controlling the condition with their leadership strengths. However, in general, this Covid-19 pandemic negatively impact on the lives of almost the entire population of the world,

* Corresponding Author, Email: asepkurniawan@syekhnurjati.ac.id

especially for women, namely, the multiple burdens of child care and work, the threat of domestic violence, and unequal treatment in the economic sector. All of these impacts showed that the Covid-19 pandemic was not gender-neutral due to the position of women who positioned unbalanced from the beginning with men in the economic and social sectors. For this reason, there should be emancipation efforts to initiate policies that were sensitive to gender issues in overcoming the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Leadership, Women, Health, Economy, Social.*

A. PENDAHULUAN

Sejak bulan Maret 2020, secara resmi pemerintah Indonesia menetapkan status pandemi Covid-19. Mulailah dunia dihadapkan pada kondisi abnormal sejak mewabahnya virus Covid-19. Dalam waktu yang singkat, virus ini mampu menembus hampir ke seluruh penjuru dunia, tercatat berdasarkan data dari Worldometers, sampai Senin 26 Mei 2021, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 147.780.699 (147 juta) kasus (Saptoyo, 2020). Artinya pandemi Covid-19 sudah merata di seluruh penjuru dunia dan menjadi tantangan keamanan kesehatan di setiap Negara. Untuk itu, diantara kebijakan untuk menghambat penyebaran pandemi adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah kebijakan *social distancing* (pembatasan jarak sosial) yang mengharuskan pembatasan aktivitas di ruang publik seperti di pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pabrik, kantor, dan lainnya. Pembatasan jarak sosial ini sudah menyebabkan kontraksi terhadap aktivitas perekonomian di Indonesia. Dengan demikian pandemi Covid-19 selanjutnya dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja dan hilangnya lapangan pekerjaan di banyak jenis wira usaha dan atau sektor informal. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi tidak saja terjadi pada ekonomi makro namun juga terhadap perekonomian rumah tangga.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi semua negara terhadap keamanan manusia, baik dari sisi keamanan ekonomi maupun keamanan kesehatan yang berpengaruh pada keamanan politik di setiap negara. Berpijak pada peta percepatan kasus Covid-19 di berbagai negara di dunia, bisa diindikasikan bahwa banyak negara yang mempunyai angka tinggi dalam kasus Covid-19, diantaranya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19. Sebaliknya, angka penyebaran Covid-19 semakin menurun, ketika tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan dari WHO. Tentunya sesuai dengan ketegasan pemerintah dalam penerapan kebijakan dalam menekan angka kasus Covid-19.

Sebuah wabah tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan gender. Hal ini disebabkan, dampak dari wabah senantiasa berbeda terhadap laki-laki dan perempuan di tengah kuatnya budaya patriarkis. Patriarki sendiri adalah sebuah sistem struktur sosial yang mengedepankan peran laki-laki sebagai figur sentral dalam suatu organisasi sosial terutama keluarga (Rawat, 2014). Hal tersebut terlihat dari bagaimana laki-laki mempunyai otoritas terhadap anak-anak, istrinya, dan harta benda. Laki-laki dipandang lebih superior dan kuat, sementara perempuan senantiasa dituntut menjadi makhluk yang ter subordinasi (Narasati, 2019). Sistem patriarki sudah membangun peradaban manusia yang berlangsung selama berabad-abad, menjalin secara turun-temurun sampai saat ini, dan menjadikan perbedaan status yang tidak seimbang di antara kedua gender di dalam lembaga masyarakat (Anita et al., 2019).

Dalam artikel ini, penulis menelaah dan memfokuskan secara mendalam bagaimana kepemimpinan perempuan pada masa pandemi dan dampak sosial dan ekonomi Covid-19 terhadapnya secara global di berbagai negara termasuk di Tanah Air. Artikel ini memfokuskan pada peran pimpinan perempuan dalam dalam mengatasi Covid-19, karakteristik kepemimpinannya, perbandingan dengan kepemimpinan laki-laki pada kondisi yang sama, dan dampak pandemi terhadap perempuan dan laki-laki dilihat dari sisi keseimbangan gender.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2007). Sedang pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dari jurnal, media massa online, website, hasil survei dari banyak lembaga penelitian, dan dokumen resmi dari banyak lembaga internasional. Data-data ini selanjutnya diorganisir, dianalisis dengan cara induktif, dan diklasifikasikan ke dalam unit-unit dan diformulasi ke dalam suatu pola.

C. RESULT AND DISCUSSION

Kepemimpinan Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Refleksi

Peran kepemimpinan perempuan secara normatif mempunyai legitimasi yang sangat kuat, baik secara hukum, filosofis, ataupun teologis. Menurut Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB, menjelaskan sejumlah pasal yang memberi kebebasan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin ataupun memilih pemimpin. Demikian pula dalam Konvensi tentang Penghapusan berbagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 dan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, sudah memberi jaminan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam wujud apapun. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, sudah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif (pasal 46). Disamping itu, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengaruh Utama Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan semua kebijakan dan program pembangunan nasional disusun dengan mengindahkan pada perspektif gender.

Kepemimpinan merupakan kegiatan manusia yang tergenderisasi dan kemanusiaan merupakan bagian dari aktivitas manusia mengatasi keadaan krisis, yang dalam hal ini adalah Covid-19. Sebenarnya terdapat benang merah ketika kita hendak memahami perbedaan akibat kondisi pandemi Covid-19, gaya kepemimpinan dan tindakan kemanusiaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kondisi kepekaan atau kesetaraan gender menjadikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi individu, kepemimpinan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, penelitian hubungan internasional bisa ditinjau dengan obyektif. Carol Hanisch mengatakan bahwa pengalaman pribadi tidak bisa dilepaskan dari struktur budaya, sosial, dan politik, bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini (OECD, 2020). Meskipun sangat banyak perempuan yang bekerja, perempuan masih belum cukup terepresentasikan baik secara nasional maupun global dalam ruang pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan covid-19. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai entitas pribadi diwujudkan secara politis untuk memposisikan diri pada wilayah-wilayah personal, sedangkan kaum pria diposisikan di ruang publik sebagai pemegang otoritas pembuat keputusan.

Kesenjangan gender dalam kepemimpinan tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang menganggap kaum perempuan menjadi pemimpin adalah pelanggaran terhadap terhadap norma-norma yang ada. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan kiprah perempuan ini. Untuk itu, penelitian tentang hubungan internasional sangat terkonsentrasi pada maskulinitas dan laki-laki yang seakan-akan obyektif dan tidak berpihak. Kebijakan luar negeri dan banyak kebijakan yang lain mayoritas disusun dan

ditetapkan oleh kaum pria, sedangkan yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah kaum perempuan, anak-anak, dan golongan minoritas yang lain. Ketidakberpihakan acapkali dijadikan alasan untuk melindungi upaya kaum maskulin terhadap berbagai kebijakan atas nama kesetaraan, padahal keduanya merupakan hal yang sangat bertolak belakang. Ketidakberpihakan tidak melihat dan menganalisa kontrol dan akses yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya yang ada dalam kondisi tertentu, bahkan terkadang kenetralan melemahkan kaum perempuan dan kaum minoritas lainnya. Hal tersebut juga melahirkan bias gender yang seringkali terjadi sampai sekarang ini dan melahirkan terjadinya diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa kasus diskriminasi terhadap perempuan yang disebabkan karena ketimpangan gender masih sering menimpa perempuan. Sylvia A. Law dalam penelitiannya tentang *Women, Work, Welfare, and the Preservation of Patriarchy* menjelaskan bahwa kaum perempuan dianggap tidak bisa diberdayakan. Hal ini dengan alasan fisik dan mental yang tidak sesuai untuk pekerjaan upahan. Hukum dan tradisi juga menghambat mereka untuk melakukan pekerjaan upahan dan lebih memosisikan kaum perempuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (Law, 1983).

Oleh sebab itu, Cynthia Enloe mempersoalkan secara kritis dan tajam tentang posisi perempuan dalam fenomena hubungan internasional yang cenderung lebih banyak berpihak kepada kaum yang kuat (maskulin)? Di manakah perempuan dalam kajian mengenai pandemi internasional seperti sekarang ini? Situasi pandemi yang terjadi sekarang ini memperlihatkan bahwa bukan hanya semata-mata *personal is political* atau *political is personal*, di mana perhatian semua orang terfokus pada fakta bahwa berbagai persoalan kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap remeh bahkan menjadi masalah yang utama. *Physical distancing, social distancing*, kecemasan, memakai masker sampai cara cuci tangan yang benar dan berbagai hal lainnya yang sebelumnya diremehkan dan dianggap tidak penting untuk dibahas berubah menjadi persoalan penting bagi berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut menegaskan terhadap apa yang dikatakan oleh Enloe bahwa *the international is personal* dan *the personal is international* (Enloe, 2014).

Relasi kuasa antara manusia sudah mengalami proses internasionalisasi sehingga banyak sekali urusan pribadi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Kondisi pandemi sudah mengantarkan umat manusia pada faktanya bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi cara sebuah negara mengatasi pandemi Covid-19

ini, yang tentunya tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah negara yang dipandang berhasil menangani kondisi pandemi Covid-19 mempunyai kesamaan di antara mereka, yakni berada di bawah kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan mereka memberi banyak pelajaran berharga bagi penanggulangan pandemi Covid-19 di berbagai penjuru dunia, yakni cinta, penguasaan teknologi, ketegasan, dan kebenaran. Kesemuanya ini, mengantarkan kesuksesan bagi banyak negara di dunia untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 dengan cara berempati dan memperlihatkan kepedulian kepada semua segmentasi masyarakat serta tidak sibuk untuk saling menyalahkan satu sama lain ataupun kondisi pandemi global yang terjadi.

Ada sejumlah penelitian lain yang berhubungan dengan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19, yaitu penelitian Chamorro-Premuzic & Gallop (2020) Gomathinayagam (2020), Garikipati & Kambhampati (2020), dan Chamorro-Premuzic & Wittenberg-Cox (2020). Semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih baik dalam merespon pandemi Covid-19. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut mendapatkan kritik dari Ella Whelan sebagai dikutip oleh Prajuli (2020) yang berkesimpulan yang bertolak belakang. Dia mengatakan bahwa terdapat inkonsistensi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin perempuan dalam merespon permasalahan internasional, terutama pandemi Covid-19. Whelan memberikan contoh sikap dingin Merkel dalam menanggapi usulan bantuan ekonomi guna mengantisipasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara-negara Uni Eropa.

Meskipun demikian, dari perdebatan akademis ini, dalam konteks penanggulangan Covid-19, dari lebih banyak riset yang lain pemimpin perempuan lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Hanya saja penelitian-penelitian tersebut mempunyai kelemahan dalam mengutarakan argumentasinya. Mereka cenderung selektif dalam memperlihatkan efektivitas kepemimpinan tersebut sebab hanya memilih negara-negara saja dan tidak memberi analisis perbandingan antara negara-negara yang dipimpin oleh perempuan dan dipimpin oleh laki-laki. Untuk itu berupaya menutupi kekurangan ini dengan mengkomparasikan respon atau penanganan yang dilaksanakan oleh para pemimpin perempuan dan laki-laki dalam merespon pandemi Covid-19. Perbandingan yang digunakan adalah jumlah kematian dari total kematian dan total kasus di banyak negara yang dipimpin oleh perempuan dan yang dipimpin oleh laki-laki. Di negara-negara yang dipimpin perempuan terdapat 223015 kasus, dengan tingkat kematian 12086 (5,4%), sementara di negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin laki-laki terdapat 2338198

kasus, dengan tingkat kematian 164401 (7,0%) (Prajuli, 2020). Data ini sebagaimana dapat dijelaskan berikut.

Tabel 1. Negara-negara Dengan Kepala Pemerintahan Perempuan

Nama	Jabatan	Negara
Angela Merkel	Kanselir	Jerman
Erna Solberg	Perdana Menteri	Norwegia
Ana Brnabić	Perdana Menteri	Serbia
Katrín Jakobsdóttir	Perdana Menteri	Islandia
Mette Frederiksen	Perdana Menteri	Denmark
Sophie Wilmès	Perdana Menteri	Belgia
Sanna Marin	Perdana Menteri	Finlandia
Jacinda Ardern	Perdana Menteri	Selandia Baru
Sheikh Hasina Wajed	Perdana Menteri	Bangladesh
Tsai Ing-wen	Presiden	Taiwan
Aung San Suu Kyi	<i>State Counsellor</i>	Myanmar
Mia Mottley	Perdana Menteri	Barbados
Jeanine Áñez	Presiden (Interim)	Bolivia

Sumber: (Prajuli, 2020).

Akhir-akhir ini, terdapat tiga belas negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan perempuan. Variabel kepala pemerintahan dipilih sebab dianggap lebih dapat menetapkan arah kebijakan negara jika dibandingkan dengan kedudukannya sebagai kepala negara. Tiga belas negara tersebut yang mempunyai kepala pemerintahan perempuan ini bisa seperti pada tabel 1 di atas.

Tabel 2. Jumlah Kematian di Negara-negara dengan Kepala Pemerintahan Perempuan

Negara	Kasus	Kematian	Persentase Kematian
Jerman	148453	5086	3,4
Norwegia	7241	182	2,5
Serbia	6630	125	1,9
Islandia	1778	10	0,6
Denmark	7891	370	4,7
Belgia	40956	5998	14,6
Finlandia	4014	141	3,5
Selandia Baru	1451	14	1,0
Bangladesh	3382	110	3,3
Taiwan	425	6	1,4
Myanmar	121	5	4,1
Barbados	75	5	6,7
Bolivia	598	34	5,7
Total	223015	12086	5,4

Sumber: (Prajuli, 2020).

Berdasarkan data pada tabel di atas ada jumlah total kasus dan kematian di sejumlah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan perempuan ditemukan fakta bahwa jumlah kematian di beberapa negara ini adalah 5,4%. Fakta yang bertolak

belakang berdasarkan angka-angka tersebut di sejumlah negara dengan kepala pemerintahan laki-laki terdapat jumlah yang lebih besar, yakni 7.0%. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3. Dari sini terlihat apabila pemimpin perempuan lebih baik dalam menanggulangi pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Kenyataan dari data penelitian ini tentunya secara empiris membantah asumsi yang sejauh ini menghinggapi publik bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memutuskan banyak kebijakan penting, baik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.

Tabel 3. Jumlah Kematian di Negara-negara dengan Kepala Pemerintahan Laki-Laki

Negara	Kasus	Kematian	Persentase Kematian	Negara	Kasus	Kematian	Persentase Kematian
Amerika Serikat	824147	44999	5,5	Kirgistan	590	7	1,2
Spanyol	204178	21282	10,4	Uruguay	543	12	2,2
Italia	183957	24648	13,4	Kosovo	510	12	2,4
Perancis	159299	20829	13,1	Honduras	494	46	9,3
Inggris	130172	17378	13,4	San Marino	476	40	8,4
Turki	95591	2259	2,4	Otoritas Palestina	466	4	0,9
Iran	84802	5297	6,2	Malta	443	3	0,7
Cina	83853	4636	5,5	Yordania	428	7	1,6
Rusia	52763	456	0,9	Senegal	412	5	1,2
Brazil	43079	2741	6,4	Georgia	408	4	1,0
Kanada	39402	1909	4,8	Kongo (Kinshasa)	350	25	7,1
Belanda	34318	3929	11,4	Mauritius	328	9	2,7
Swiss	28063	1478	5,3	Montenegro	313	5	1,6
Portugis	21379	762	3,6	Sri Lanka	310	7	2,3
India	20080	645	3,2	Kenya	296	14	4,7
Peru	17837	484	2,7	Guatemala	316	8	2,5
Irlandia	16040	730	4,6	Somalia	286	8	2,8
Swedia	15322	1765	11,5	Venezuela	288	10	3,5
Austria	14873	491	3,3	Vietnam	268	0	0,0
Israel	13942	184	1,3	Mali	258	14	5,4
Arab Saudi	11631	109	0,9	Tanzania	254	10	3,9
Jepang	11135	263	2,4	El Salvador	225	7	3,1
Chile	10832	147	1,4	Jamaika	233	6	2,6
Korsel	10633	237	2,2	Paraguay	213	8	3,8
Ekuador	10398	520	5,0	Kongo (Brazzaville)	165	6	3,6

Polandia	9856	401	4,1	Gabon	156	1	0,6
Pakistan	9565	201	2,1	Rwanda	150	0	0,0
Romania	9242	498	5,4	Sudan	140	13	9,3
Singapura	9145	11	0,1	Brunei	138	1	0,7
Meksiko	8772	11	0,1	Kamboja	122	0	0,0
Uni Emirat Arab	7755	46	0,6	Madagaskar	121	0	0,0
Indonesia	7135	616	8,6	Trinidad & Tobago	115	8	7,0
Ceko	7033	201	2,9	Ethiopia	114	3	2,6
Belarusia	6723	55	0,8	Liberia	101	8	7,9
Filipina	6599	437	6,6	Monako	94	3	3,2
Australia	6547	67	1,0	Togo	86	6	7,0
Qatar	6533	9	0,1	Guinea Khatulistiwa	83	0	0,0
Ukraina	6125	161	2,6	Maladewa	83	0	0,0
Malaysia	5482	92	1,7	Liechtenstein	81	1	1,2
Republik Dominika	5044	245	4,9	Zambia	70	3	4,3
Panama	4658	136	2,9	Tanjung Verde	68	1	1,5
Kolombia	4149	196	4,7	Guyana	66	7	10,6
Luksemburg	3618	78	2,2	Bahama	65	9	13,8
Mesir	3490	264	7,6	Uganda	61	0	0,0
Afsel	3465	58	1,7	Libya	59	1	1,7
Maroko	3209	145	4,5	Haiti	58	4	6,9
Argentina	3144	151	4,8	Benin	54	1	1,9
Aljazair	2811	392	13,9	Guinea-Bissau	50	0	0,0
Thailand	2811	48	1,7	Sierra Leone	50	0	0,0
Moldova	2614	72	2,8	Nepal	42	0	0,0
Yunani	2401	121	5,0	Suriah	42	3	7,1
Hongaria	2098	213	10,2	Eritrea	39	0	0,0
Kuwait	2080	11	0,5	Mozambik	39	0	0,0
Kazakhstan	1995	19	1,0	Mongolia	34	0	0,0
Bahrain	1973	7	0,4	Chad	33	0	0,0
Kroasia	1908	48	2,5	Eswatini	31	1	3,2
Uzbekistan	1678	6	0,4	Zimbabwe	28	3	10,7
Irak	1602	83	5,2	Angola	24	2	8,3
Estonia	1552	43	2,8	Antigua & Barbuda	23	3	13,0
Oman	1508	8	0,5	Timor Leste	23	0	0,0
Azerbaijan	1480	20	1,4	Botswana	20	1	5,0
Armenia	1401	24	1,7	Laos	19	0	0,0
Lithuania	1350	38	2,8	Belize	18	2	11,1
Slovenia	1344	77	5,7	Fiji	18	0	0,0
Bosnia & Herzegovina	1342	51	3,8	Malawi	18	2	11,1

Makadonia Utara	1231	55	4,5	Dominika	16	0	0,0
Slovakia	1199	14	1,2	Namibia	16	0	0,0
Kamerun	1163	43	3,7	St Kitts & Nevis	15	0	0,0
Kuba	1137	38	3,3	St Lucia	15	0	0,0
Afghanistan	1092	36	3,3	Republik Afrika Tengah	14	0	0,0
Ghana	1042	9	0,9	Grenada	14	0	0,0
Bulgaria	975	45	4,6	St. Vincent & Grenadines	12	0	0,0
Djibouti	945	2	0,2	Seychelles	11	0	0,0
Pantai Gading	916	13	1,4	Gambia	10	1	10,0
Tunisia	901	38	4,2	Nikaragua	10	2	20,0
Siprus	786	12	1,5	Suriname	10	1	10,0
Nigeria	782	25	3,2	Vatikan	9	0	0,0
Latvia	748	9	1,2	Mauritania	7	1	14,3
Andorra	717	37	5,2	Papua Nugini	7	0	0,0
Guinea	688	6	0,9	Bhutan	6	0	0,0
Lebanon	677	21	3,1	Sahara Barat	6	0	0,0
Kosta Rika	669	6	0,9	Burundi	5	1	20,0
Niger	657	20	3,0	Sao Tome & Principe	4	0	0,0
Albania	609	26	4,3	Sudan Selatan	4	0	0,0
Burkina Faso	600	38	6,3	Yaman	1	0	0,0
Total					2338198	164401	7,0

Sumber: (Prajuli, 2020).

Dengan demikian jelas bahwa apabila kita mengambil patokan dari pengukuran persentase kematian di sejumlah negara yang dipimpin oleh perempuan mempunyai keadaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan di banyak negara yang dipimpin oleh laki-laki dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Hasil pengukuran ini tentunya menegaskan anggapan bahwa pemimpin perempuan mempunyai kemampuan yang lebih baik saat menanggulangi pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki.

Hal tersebut menjadi suatu alasan akademis dari satu hasil penelitian akademis, bahwa orang akan lebih aman dalam keadaan pandemi Covid-19, apabila tinggal di negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Supria Garikipati dalam risetnya menjelaskan bahwa banyak negara dengan pemimpin perempuan ditetapkan *lockdown* lebih awal. Mereka mengikuti imbauan atau anjuran yang ditetapkan oleh sejumlah ahli keilmuan dengan ketat dan cepat. Dipimpin perempuan memberikan keuntungan bagi negara-negara dalam krisis sekarang ini. Hasil penelitian ini dengan jelas memperlihatkan

pemimpin perempuan bertindak lebih tegas dan cepat dalam mengatasi potensi kematian. Di hampir seluruh kasus, mereka mengurung wilayahnya lebih awal dibandingkan pemimpin laki-laki. Hal tersebut tentunya sudah membantu menyelamatkan nyawa. Penelitian tersebut berpijak pada data makro yang berasal dari Bank Dunia terdiri dari 194 negara sampai 19 Mei 2020. Dari banyak negara yang diteliti ini, hanya 19 negara di antaranya yang dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. Akan tetapi, dalam data ini tidak termasuk Hong Kong dan Taiwan, sebab keduanya tidak masuk dalam data yang dimiliki Bank Dunia. Apabila Hong Kong dan Taiwan masuk ke dalam perhitungan, maka hasil penelitian Garikipati tersebut dapat menjadi lebih kuat yang kebetulan dua negara ini juga dipimpin oleh perempuan dan menjadi negara yang paling sukses di dunia dalam mengendalikan pandemi (Reading, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam mengatasi pandemi ini, kaum perempuan sudah ikut berdiri di garis terdepan sebagai inisiator, pekerja kesehatan sampai penggiat komunitas. Para pemimpin perempuan juga sudah menunjukkan kemampuan untuk memimpin dalam program penanggulangan dan pemulihan Covid-19 di banyak negara dunia.

Walaupun secara global, kuantitas pemimpin perempuan masih sangat terbatas sebagai akibat banyak ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi, namun banyak pemimpin perempuan sudah dapat memperlihatkan kinerja yang nyata untuk membenahi kondisi yang serba tidak menentu ini, terlepas dari seberapa kompleks atau seberapa besarnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara dengan berbagai dinamikanya (Gupta & Farrar, 2020). Taiwan, Norwegia, Selandia Baru, Jerman, Finlandia, Islandia, dan Denmark adalah sejumlah contoh negara yang dipimpin oleh perempuan yang tercatat sukses merespon yang sangat baik dan cepat atau menyeluruh dalam mengatasi pandemi ini berpijak pada data yang dilaporkan oleh Pusat Pengendalian Penyakit Eropa (A. Wittenberg-Cox, 2020).

Banyak negara yang dipimpin oleh para pemimpin perempuan memang memperlihatkan progres positif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Contoh Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan, dan Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman, dan lain-lain. Dewasa ini suatu riset menerangkan bahwa anggapan soal kemampuan pemimpin perempuan dalam mengatasi pandemi lebih baik daripada pemimpin laki-laki itu tidak hanya sekedar asumsi. Sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, pemimpin perempuan dianggap dapat memberi reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat. Disamping itu

pula lebih siap untuk mengambil risiko ekonomi untuk melindungi kehidupan warganya jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam keadaan yang sama (Dodwell, 2020).

Penelitian ini sepakat apabila pada umumnya pemimpin laki-laki seperti Boris Johnson (Inggris), Jair Bolsonaro (Brasil), dan Donald Trump (AS) tidak terlalu menekankan tindakan serius dalam mengatasi Covid-19. Contoh Bolsonaro yang menjelaskan Covid-19 menyerupai demam atau flu, Johnson yang tetap bersalaman dengan setiap orang di rumah sakit, dan sebagainya. Hal yang berbeda, pemimpin perempuan seperti Jacinda Arden dan Angela Merkel memperlihatkan langkah kerja yang nyata. Kerja mereka banyak memperoleh penghargaan, sebab dinilai dapat menyelamatkan banyak nyawa dari bahaya penularan Covid-19. Walaupun demikian, Garikipati memfokuskan penelitiannya pada tahap awal perkembangan pandemi global yang dilandaskan pada reaksi langsung para pemimpin di wabah pertama Covid-19. Sehingga penelitian ini harus untuk diulang saat telah ada pembaruan data, baik yang berhubungan dengan kerugian ekonomi dan korban, yang dapat jadi akan dilaksanakan satu tahun dari sekarang. Akan tetapi memang, sekarang ini telah bisa terlihat dengan jelas adanya perbedaan terukur dan sistemik dalam keefektifan penyusunan kebijakan saat sebuah negara dipimpin oleh seorang perempuan. Mereka memiliki kasih sayang, empati, mau berkolaborasi, dan mendengarkan. Keadaan tersebut sangat berharga dan penting tidak saja dalam mengatasi pandemi, akan tetapi juga persoalan lain yang menuntut dilakukannya kerjasama internasional yang kuat. Contohnya penggunaan sumber daya, pencemaran lingkungan, krisis iklim, dan sebagainya. Saat dihadapkan dengan pengalaman negatif, pria cenderung untuk bertindak dengan amarah, sedangkan perempuan bereaksi dengan hati-hati (Reading, 2020).

Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan permasalahan topik yang sama dengan studi sebelumnya dilaporkan oleh tim Trinity College Dublin. Lembaga ini menemukan fakta pengaruh perekonomian negara yang dipimpin oleh kepala negara perempuan enam kali lebih kecil jika dibanding dengan negara lain. Demikian pula dengan jumlah kasus kematian di negaranya lebih kecil. Hal ini terlihat dari proses perataan kurva berjalan lebih cepat, puncaknya kasus 6 kali lebih kecil dari negara lain yang dipimpin oleh laki-laki (Dublin, 2020). Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan menjelaskan mayoritas negara-negara yang dipimpin perempuan lebih memfokuskan pada lingkungan dan kesejahteraan sosial, juga lebih berinvestasi pada kesehatan publik. Penelitian tersebut dipertegas penelitian lain yang juga melaporkan bahwa banyak negara yang dipimpin perempuan memiliki lebih sedikit kasus, bekerja lebih baik, dan lebih sedikit

terjadinya kematian. Penelitian ini bertolak belakang dengan banyak riset yang mengatakan bahwa pemimpin perempuan umumnya menghindari risiko, akan tetapi penelitian dari Liverpool ini melaporkan hal sebaliknya. Para kepala negara perempuan malah siap mengambil risiko dengan tegas untuk ekonomi mereka dengan menerapkan *lockdown* lebih awal (Reading, 2020).

Kesuksesan pemimpin global perempuan tentunya tidak bisa dilepaskan dari banyak *gender stereotyping* yang menjadi bagian dari ketidakadilan berbasis gender dan proses konstruksi gender yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Cengeng, tidak tegas, lemah, dan emosional sejumlah hal lainnya disematkan kepada kaum perempuan sehingga mereka dinilai tidak dapat untuk membuat keputusan lebih-lebih menjadi seorang pemimpin. Sejumlah perempuan yang sukses menjadi pemimpin global ini sudah sukses mengatasi tantangan yang dikenal dengan istilah "*glass escalator*" dan "*glass ceiling*" (Klenke, 2011). Dalam hal ini, perempuan mengatasi banyak kendala yang tidak terlihat, namun sangat kuat menahan peran perempuan untuk terus maju dan mengalami peningkatan peran kepemimpinan mereka di dalam tempat mereka berkiprah, hanya dikarenakan mereka perempuan. Hymowitz dan Schelhardt yang memperkenalkan istilah tersebut untuk mendiskripsikan bahwa perempuan mengalami hambatan untuk maju bukan sebab faktor kurangnya pendidikan, keahlian, atau pengalaman, namun hanya disebabkan mereka perempuan.

Selain itu, relasi kuasa yang sangat berdampak kepada interaksi manusia menjadi sangat dominan mengekang kaum perempuan untuk menjadi figur pemimpin. Kekuasaan yang mereka miliki juga berbeda penerapannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki. Kepemimpinan perempuan sangat didominasi oleh *power within* yang sangat mengutamakan gerak langkah bersama dan kekuatan bersama. Berbeda dengan *power over* yang sangat mewarnai kepemimpinan laki-laki yang menjadikannya cenderung arogan dan sangat dominan. *Power within* inilah yang menjadi penggerak banyak pemimpin global perempuan menggerakkan kita semua untuk mengutamakan aspek humanis dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini. Jika dalam kondisi normal, bukan keadaan krisis seperti saat ini, pekerjaan perempuan telah dipandang kurang penting dan sekedar sebagai tambahan, maka dalam kondisi krisis hal ini semakin bertambah kurang kondusif. Perempuan tidak saja menjadi golongan pertama yang kehilangan sumber penghasilan dan pekerjaan namun pula mesti menanggung dampak dan beban kerja reproduksi yang cukup berat: sebagai individu (sosial, ekonomi, fisik, dan mental) sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat (Thompson,

2020). Keadaan tersebut memaksa kaum perempuan untuk tetap berjuang menjaga ekonomi keluarga, menciptakan dan mempertahankan usaha yang bisa dilakukan. Kaum perempuan dipaksa untuk tidak akan malu dan ragu untuk memulai usahanya lagi dari awal akibat hantaman krisis ini.

Dampak Covid-19 terhadap Perempuan

Ketidak seimbangan gender di dalam masyarakat dipandang ikut meningkatkan dampak buruk Pandemi Covid-19 bagi kaum perempuan. Rapid Gender Assessment (RGA) yang dilakukan oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia mendapatkan fakta lebih dari 15% perempuan kehilangan pekerjaan, 41% perempuan mengalami pengurangan upah, dan menemukan adanya peningkatan beban dan jam kerja perempuan di dalam keluarga, selama pandemi Covid-19 (Women, 2020). Temuan riset ini sejalan dengan penelitian Mathur & Awasthi bahwa dalam dunia kerja kaum perempuan cenderung mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Eksistensi kaum perempuan ke dalam bidang ekonomi aktif memang jarang sesuai dengan peningkatan upah yang sepadan dalam kondisi hidup (kerja) mereka. Berpijak pada data International Labour Organization, perempuan di sejumlah negara mempunyai penghasilan antara 50% dan 96% dari upah laki-laki (Mathur & Awasthi, 2018). Sementara itu, tidak saja berpengaruh sosial dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan peningkatan kerawanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). *Shadow pandemic* merupakan konsep yang menerangkan gejala meningkatnya kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Angka ini dilihat dari semakin banyaknya panggilan telepon darurat di banyak negara dunia (Women, 2020). Bagi banyak perempuan, dipaksa diam di rumah karena *work from home* (WFH) dan PSBB sehingga tidak dapat keluar adalah ancaman terbesar bagi keamanan jasmani dan rohani. Hal tersebut disebabkan, WFH memberikan peluang besar bagi seorang pelaku kekerasan karena dia dapat mengisi lebih banyak waktu secara personal dengan korban; terlepas dari pengawasan orang lain. Pada permulaan munculnya wabah Covid-19 di China, kantor polisi di negara itu mendapatkan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat sampai tiga kali lipat. Berdasarkan laporan dari Guardian (21/03), 90% penyebab kekerasan domestik ini memang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Tidak saja di China, India pun melaporkan adanya peningkatan dua kali lipat kasus KDRT di pekan pertama penerapan kebijakan *lockdown* nasional. Di Prancis, kasus KDRT meningkat tiga kali lipat. Demikian pula di Jakarta di mana pada permulaan penerapan

kebijakan WFH, ada tujuh belas kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga Direktur LBH Apk, Situ Zuma menjelaskan hal tersebut merupakan angka tertinggi yang terdata dalam waktu dua minggu (Oktavianti, 2020). Karena kondisi memprihatinkan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akhirnya mendesak pemerintah dunia untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan dalam usaha penanggulangan Covid-19.

Permasalahan gawat seperti ini memancing UN Women, sebuah lembaga yang diabdikan untuk mengatasi pemberdayaan perempuan, mengkampanyekan kesadaran masyarakat terhadap *Shadow Pandemic*, kecenderungan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah krisis Covid-19. Dalam suatu video layanan publik *Shadow Pandemic* yang diungkapkan oleh aktor pemenang Academy Award, Kate Winslet, UN Women memberikan pesan penting untuk semua orang untuk menolong kaum perempuan yang ada di sekitar mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Women, 2020).

Keluarga merupakan '*gendered institution*' yang menjadi salah satu kajian penting dalam studi-studi tentang feminisme. Feminisme melihat kehidupan keluarga di dalam masyarakat yang bercorak patriarkis sebagai perwujudan dari relasi gender yang tidak seimbang, di mana peran gender perempuan ditempatkan dan dikonstruksikan sebagai subordinat. Dalam struktur masyarakat yang bercorak patriarkis, perempuan diposisikan dengan peran produksi afektif-seksual, yang berkewajiban memberi pengasuhan emosional kepada anak-anaknya, serta kepuasan seksual bagi laki-laki. Sedangkan, aktivitas di dalam keluarga, seperti kerja pengasuhan atau kerja rumah tangga, cenderung dipandang mempunyai nilai ekonomi yang lebih rendah, dan dinilai sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan.

Secara ekonomi akibat wabah ini, Amerika Serikat mengalami resesi dengan sekurang-kurangnya 6,6 juta penduduknya kehilangan pekerjaan per 9 April (Cohen & Hsu, 2020). PHK besar-besaran ini diprediksi akan terus berlangsung sebab perusahaan yang terpaksa tutup. Berdasarkan data Fuller Project (Scharff & Ryley, 2020), perempuan mengalami kerugian terbesar dari krisis saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar pengangguran di wilayah seperti Minnesota, Virginia, New Jersey, dan New York adalah perempuan. Pengusaha lebih cenderung memberhentikan pekerja perempuan lebih dulu daripada pekerja laki-laki di tengah gelombang PHK karena orang-orang hidup di dunia dengan narasi bahwa nilai penghasilan perempuan dinilai sekunder jika dibandingkan dengan laki-laki (Company, 2020). Berpijak pada survei online yang dilakukan oleh Payscale pada tahun 2020, perempuan mendapatkan upah \$0,81 untuk

setiap \$1 yang diperoleh oleh laki-laki. Ketimpangan penghasilan gender ini terjadi juga dalam pekerjaan yang sangat terdampak oleh virus Covid-19. Contohnya, guru sekolah dasar memperoleh \$0,92 untuk setiap upah \$1 untuk laki-laki. Demikian pula dengan Pramugari menerima \$0,92. Di antara para pekerja medis semisal dokter wanita memperoleh \$0,94, sementara itu perawat \$0,98. Perempuan yang mengisi 90% jumlah perawat, menerima risiko kesehatan yang sangat tinggi sementara ia menerima upah lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki (PayScale, 2020). Disamping itu, berpijak pada studi oleh ekonom Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, dan Michèle Tertilt, resesi ekonomi pada saat pandemi Covid-19 semakin menjadikan perempuan lebih menderita. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan. Antara bulan Februari dan April 2020, pengangguran laki-laki meningkat 9,9%, sedangkan pengangguran perempuan meningkat menjadi 12,8% (Rosalsky, 2020). Ini artinya bahwa bias gender pada masa pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi sangat dirasakan oleh kaum perempuan.

Walaupun perempuan menempati posisi subordinat, namun ia tetap mempunyai agensi untuk bertahan di masa pandemi Covid-19, bahkan untuk memberi dukungan bagi masyarakatnya. Dalam ruang sosial yang terbatas di masa pandemi Covid-19, perempuan dapat mengadvokasi dan menggerakkan aksi kolektif, tidak saja untuk bertahan hidup, namun pula membangun ruang bagi kepentingan masyarakat. Misalnya Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sleman dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan Bakti Sosial untuk menciptakan solidaritas melawan Covid-19. Kepedulian berbagi masker dan sembako dibagikan kepada 65 kelompok rentan miskin (keluarga miskin, lansia) yang berada di sekitar para anggota organisasi ini. Mereka terus berusaha mengadvokasi masyarakat untuk secara bersama-sama terlibat kegiatan kemanusiaan seperti ini (P3AP2KB, 2020). Demikian pula dengan organisasi perempuan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIX Pati melalui berbagai kegiatan sukarela dan nirlaba telah menunjukkan diri sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan revitalisasi modal sosial di masyarakat, terutama melalui jaringan yang dimiliki secara struktural maupun non structural memberikan penguatan *social capital* melawan Covid-19 (Dewi Erowati, Kuncoro Bayu Prasetyo, Sri Astuty, 2020). Tidak ketinggalan pula dengan Muslimat dan Fatayat NU yang menjadi organisasi perempuan yang berada garda di depan gencar mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang fiqih ibadah di masa pandemi Covid-19. Penyebaran virus Corona sudah mengakibatkan ibadah-ibadah yang mengutamakan dilaksanakan secara berjamaah tidak dapat dilaksanakan secara

normal (Godjali & Mayrudin, 2020). Dengan demikian, walaupun ruang publik di masa pandemi Covid-19 semakin menyempit, akan tetapi para aktivis perempuan tetap mendarmabaktikan kiprahnya memecahkan permasalahan yang ada masyarakat.

Analisis terhadap relasi gender yang tidak seimbang di dalam keluarga penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Implementasi *social distancing* mengakibatkan mayoritas aktivitas di ruang publik mesti dilaksanakan dari rumah. Sehingga selama masa pandemi masyarakat melihat munculnya banyak bentuk aktivitas seperti bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah dengan jarak jauh, beribadah jarak jauh, termasuk pula berbelanja secara daring (*online shopping*). Kebijakan yang mesti ditempuh untuk mengatasi kondisi pandemi lebih terasa pengaruhnya bagi perempuan dimana mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh apa yang ada di rumah. Tersentralisasinya banyak aktivitas ke dalam rumah mengakibatkan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga bertambah besar. Selama masa pandemi, misalnya, ibu rumah tangga yang bekerja (*working mother*) harus bisa mengatur waktu dan beban kerja antara bekerja dari rumah sambil mendampingi anak bersekolah secara daring. Anak-anak diharuskan untuk belajar di rumah bersama-sama dengan orang tuanya sebagai pengganti guru di sekolah. Siapa yang dimaksudkan dengan orangtua dalam hal ini? Tentu saja, seorang ibu yang dinilai paling bertanggung jawab. Berpijak pada hasil riset di Amerika Serikat oleh Kepala 21st Century Endowed Chair in Teacher Quality pada departemen reformasi pendidikan di Universitas Arkansas, Gemma Zamarro, mengatakan bahwa perempuan menanggung beban yang lebih besar dan berat daripada laki-laki dalam mengasuh anak-anaknya selama pandemi Covid-19. Dari responden suami istri dengan anak, sejumlah 44 perempuan memberi pengasuhan anak sendirian dibandingkan 14% laki-laki (Zamarro, Perez-Arce, Prados, 2020).

Berdasarkan sebuah survei yang dirilis oleh Trades Union Congress, kaum ibu rumah tangga yang bekerja di Inggris kehilangan berbagai tempat pengasuhan anak pada pandemi Covid-19, sehingga mereka terpaksa harus bekerja sekaligus pada saat yang sama mengasuh anak-anak sampai akhir batas kemampuan mereka. Sebanyak 3 dari 10 orang dari mereka mengaku mesti bekerja sejak pagi (sebelum jam 8 pagi) sampai larut malam (setelah jam 8 malam) untuk menyeimbangkan pengasuhan anak dan pekerjaan. Dampaknya, banyak ahli memperingatkan bahwa pandemi bisa membuat kondisi kaum perempuan mengalami kemunduran sampai seperti beberapa dekade ke belakang dan mempertajam ketimpangan upah antar gender. Survei menunjukkan bahwa satu dari enam wanita mengaku bahwa mereka mengalami kecemasan untuk melakukan pekerjaan

sekaligus mengasuh anak dapat berdampak kepada penilaian kinerja dari manajer mereka. Sedangkan, satu dari enam perempuan merasa khawatir hal itu berdampak pada peluang mereka untuk memperoleh promosi pekerjaan di masa yang akan depan (Topping, 2020).

Di masa pandemi, seorang ibu juga mesti memastikan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan biaya listrik yang naik di saat pendapatan keluarga sedang menurun. Tanggung jawab perempuan di masa pandemi juga pada munculnya potensi terjadinya kemiskinan khususnya bagi orang tua tunggal, kekerasan dalam rumah tangga, dan sejumlah permasalahan kompleks yang lain. Kesemuanya ini memperlihatkan betapa pentingnya proses memanusiakan kembali manusia dengan menerapkan pendekatan yang humanis. Setiap orang dipanggil untuk mengenali kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini dan melaksanakan upaya kemanusiaan.

Demikian pula setiap orang dipanggil untuk mengambil bagian sekecil apapun sejalan dengan kemauan dan kemampuan, serta sejalan dengan bidang keilmuan yang dimiliki sejalan dengan anggapan bahwa teori senantiasa untuk siapapun dan untuk berbagai tujuan. Sama halnya pula dengan banyak teori yang berkembang dalam penelitian hubungan internasional, dilahirkan dari disiplin kajian hubungan internasional untuk laki-laki dan perempuan agar dapat saling memanusiakan satu sama lain, dalam keadaan apapun, lebih-lebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Sangat penting guna memastikan bahwa usaha tanggap kemanusiaan telah memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Analisa kemanusiaan mesti memperhitungkan aspek gender, disabilitas, usia, dan banyak aspek identitas manusia dengan menerapkan pendekatan *intersectional feminist* (Lafrenière et al., 2019).

Secara umum, satu hal yang bisa disimpulkan dari seluruh pembahasan di atas adalah bahwa faktanya perempuan justru memiliki potensi lebih sebagai pemimpin dan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 namun dampak dari pandemi Covid-19 ini sesungguhnya tidaklah gender-neutral. Kedudukan perempuan tidak seimbang dengan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pengecualian kaum perempuan sebagai pembuat keputusan dan dikotomi gender adalah persoalan tradisional dalam budaya patriarkis ujung-ujungnya menjadikan kondisi pandemi Covid-19 menghantam kaum perempuan lebih keras dibandingkan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, sistem patriarki memunculkan momentum yang penting sehingga semestinya bisa menjadi point permulaan katalisasi gerakan penolakan subordinasi kaum perempuan. Di lain pihak,

para penentu kebijakan semestinya ikut mempertimbangkan permasalahan gender dalam mengatasi krisis yang akut ini.

Refleksi yang bisa kita angka adalah dalam rangka terealisasinya hak-hak yang dimiliki perempuan dan memaksimalkan semua potensi kepemimpinan perempuan yang responsif dalam memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh dampak krisis pandemi Covid-19. Pendekatan keperempuanan dan keunikan perempuan seyogyanya dapat dipadukan ke dalam perumusan serta penerapan kebijakan program pemulihan krisis dari dampak pandemi Covid-19. Perempuan mempunyai tempat sebagai pemimpin yang mesti dioptimalkan dan senantiasa menerapkan pendekatan perempuan agar berbagai ikhtiar mengenai proses pemulihan krisis bagi kesejahteraan bagi semua masyarakat bisa tercipta dan mengenai sasaran. Ini artinya pula, akses perempuan sebagai pengambilan kebijakan strategis, baik di tingkat negara dan tingkat internasional, mesti diberikan seluas-luasnya sebab perempuan mempunyai kemampuan yang baik dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis.

D. CONCLUSION

Pandemi Covid-19 yang terjadi menunjukkan kiprah para pemimpin perempuan berhasil mengendalikan kondisi krisis dengan kelebihan-kelebihan kepemimpinannya. Meskipun demikian ada hal yang berbeda, secara umum pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan pada hampir seluruh penduduk dunia, khususnya bagi kaum perempuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, negara-negara menetapkan kebijakan protokol kesehatan, yaitu *lockdown* dan *work from home*. Walaupun ada sedikit banyak menekan penyebaran virus, namun disisi lain memiliki dampak negatif seperti pelemahan ekonomi secara global terutama dampak ekonomi dan sosial terhadap kaum perempuan. Mereka mengalami tiga dampak utama, yakni beban berlipat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan ketimpangan perlakuan dalam bidang ekonomi. Semua dampak tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak gender-neutral disebabkan posisi perempuan yang sudah sejak awal diposisikan tidak seimbangan dengan laki-laki dalam sektor ekonomi dan sosial. Untuk itu, semestinya harus ada upaya emansipasi untuk menginisiasi kebijakan yang sensitif terhadap persoalan gender dalam mengatasi pandemi Covid-19.

REFERENCES

- Anita, D., Yoanita, D., Wahjudianata, M. 2019. Representasi patriarki dalam film "A Star Is Born". *Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra, Surabaya*, 7(2), 1-13.
- Bressler, C. E. 2007. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed.* London: Pearson Education, Inc.
- Chamorro-Premuzic, T., & Wittenberg-Cox, A. 2020. *Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership?* *Crisis Management, Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2020/06/will-the-pandemic-reshape-notions-of-female-leadership>
- Chamorro-Premuzic, T., & Gallop, C. 2020. *7 Leadership Lessons Men Can Learn from Women*. <https://hbr.org/2020/04/7-leadership-lessons-men-can-learn-from-women>
- Cohen, P., & Hsu, T. 2020. Sudden Black Hole' for the Economy With Millions More Unemployed. <https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/unemployment-claim-numbers-coronavirus.html>
- Company, F. 2020. *Why Women will be Hardest hit by a Coronavirus-Driven Ecession*. <https://www.fastcompany.com/90479204/why-women-will-be-hardest-hit-by-a-coronavirus-driven-recession>
- Dodwell, D. 2020. *The Science is Clear: Women-Led Countries are Doing Better in the Pandemic*. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3098194/science-clear-women-led-countries-are-doing-better-pandemic>
- Dublin, T.C. 2020. *Countries with Female Leaders Suffer Six Times Fewer COVID-19 Deaths*. https://www.tcd.ie/news_events/articles/countries-with-female-leaders-suffer-six-times-fewer-covid-19-deaths/
- Erowati, D., Prasetyo, K.B., Astuty, S., Anggraeni, T. 2020. Peran organisasi perempuan dalam penguatan social capital melawan pandemi Covid-19: Studi pada gerakan kampanye sosial Persit Kartika Chandra Kirana XXXIX Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 5(1). DOI: 10.24198/umbara.v5i1.28056
- Enloe, C. 2014. *Banana, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley: University of California Press.
- Mathur & Awasthi. 2018. Gender-based discrimination faced by females at workplace: A perceptual study. *Journal of Entrepreneurship Education*, 21(3), 1-7.
- Narasati, R. 2019. The causes and effects of women's superiority towards men as seen in aristophanes' Lysistrata. *Jurnal Kredo*, 3(1), 17-35.
- OECD. 2020. *The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government*. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/>
- Garikipati, S., Kambhampati, U. 2020. Leading the fight against the pandemic: Does gender 'really' matter? *SSRN Electronic Journal*, 1-17. DOI:10.2139/ssrn.3617953
- Godjali, M.R., Mayrudin, Y.M. 2020. Partisipasi perempuan melalui organisasi non pemerintah Fatayat dan muslimat Nahdlatul Ualama dalam penganan Covid-19. *Jurnal of Government*, 6(1), 1-19.
- Gomathinayagam, I. 2020. The promise of women leadership in COVID management. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23(9), 1-4. DOI:10.4102/sajemsin.v23i1.6405
- Gupta, G.R., & Farrar, J. 2020. *Opinion: Why We Need Women's Leadership in the COVID- 19 Response*. <https://news.trust.org/item/20200401090723-319sb/>
- Klenke, K. 2011. Women in leadership: Contextual dynamics and boundaries bingley. *Leadership*, 8(2), 199-202. DOI: 10.1177/1742715011434762
- Lafrenière, J., Sweetman, C., & Thylin, T. 2019. Introduction: gender, humanitarian action and crisis response. *Gender & Development*, 27(2), 187-201. DOI: 10.1080/13552074.2019.1634332

- Law, S.A. 1983. Women, work, welfare, and the preservation of patriarchy. *University of Pennsylvania, Law Review. American Law Register*, 131(6), 1250–1254.
- Oktavianti, T.I. 2020. *Jakarta Records Spike in Domestic Violence Reports during Work-From-Home Period*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/07/jakarta-records-spike-in-domestic-violence-reports-during-work-from-home-period.html>
- PayScale. 2020. *The State of the Gender Pay Gap in 2021*. <https://www.payscale.com/data/gender-pay-gap>
- P3AP2KB, D. 2020. *Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sleman Membangun Solidaritas melawan Covid-19*. <http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2020/04/gabungan-organisasi-wanita-kabupaten-sleman-membangun-solidaritas-melawan-covid-19/>
- Rawat, P.S. 2014. Patriarchal beliefs, women's empowerment, and general well-being. *Vikalpa*, 39(2), 43-55.
- Reading, U. 2020. *#Wearetogether: Female Led Countries' Covid-19 Outcomes Systemtically and Significantly Better*. <https://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR846481.aspx>
- Rosalsky, G. 2020. *How The Pandemic Is Making The Gender Pay Gap Worse*. <https://www.npr.org/sections/money/2020/08/18/903221371/how-the-pandemic-is-making-the-gender-pay-gap-worse?t=1621565433736>
- Saptoyo, R.D.A. 2020. *Update Corona Dunia 26 April: 10 Negara dengan Kasus Terbanyak | Situasi di India*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/26/112100665/update-corona-dunia-26-april--10-negara-dengan-kasus-terbanyak-situasi-di?page=all>
- Scharff, X., & Ryley, S. 2020. *Breaking: Some States Show Alarming Spike in Women's Share of Unemployment Claims*. <https://fullerproject.org/story/some-states-shows-alarming-spike-in-womens-share-of-unemployment-claims/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Thompson, M. 2020. *Why the Gendered Political Economy of COVID-19 Matters*. <http://speri.dept.shef.ac.uk/2020/04/15/why-the-gendered-political-economy-of-covid-19-matters/>
- Topping, A. 2020. *Childcare Crisis Risks Pushing Women out of Workforce, Says TUC*. <https://www.theguardian.com/money/2020/sep/03/childcare-crisis-risks-pushing-women-out-of-workforce-says-tuc>
- Wendy Prajuli. 2020. *Apakah Pemimpin Perempuan lebih baik dalam Menangani Pandemi Covid-19*. <https://ir.binus.ac.id/2020/04/22/apakah-pemimpin-perempuan-lebih-baik-dalam-menangani-pandemi-covid-19/>
- Wittenberg-Cox, A. 2020. *What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders*. <https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/04/13/what-do-countries-with-the-best-coronavirus-reponses-have-in-common-women-leaders/>
- Women, U.N. 2020. *Survey shows COVID-19 impacts on gender inequality in Albania*. <https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/10/new-survey-shows-covid19-impacts-on-gender-inequality-in-albania>
- Zamarro, G., Perez-Arce, F., Prados, M.J. 2020. *Gender Differences in the Impact of COVID-19*. Southern California: Center for Economic and Social Research.